



KAMPUS MERDEKA DALAM PENGEMBANGAN UMKM (SUATU MODEL KOLABORATIF PARTISIPATIF)

Endang Purwaningsih¹⁾, Muslikh²⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas YARSI

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI

Abstrak

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang menunjang kemanfaatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi masyarakat, industri maupun UMKM. Sektor UMKM merupakan sektor yang paling penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, dan sebagai lapangan kerja yang tidak pernah jenuh dalam menyerap tenaga kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat dan mengembangkan sebuah model fix yang dapat diterapkan dalam proses pengembangan UMKM melalui program kampus merdeka, sekaligus mendeskripsikan peran masing-masing stakeholders yang berkaitan dengan UMKM seperti perguruan tinggi, pemerintah, dan asosiasi UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian normatif terapan, juga penelitian pemberdayaan dengan menggunakan participatory research approach. Subjek penelitian adalah 91 pelaku UMKM dengan tingkat kesiapan teknologi (rerata TKT 2-3) di Cempaka Putih Jakarta Pusat yang berada dalam satu perkumpulan yang belum berbadan hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa model MBKM yang paling tepat dalam pemberdayaan UMKM adalah mengintegrasikan peran kampus dalam pemberdayaan UMKM, meningkatkan peran pemerintah dan stakeholders, serta meningkatkan peran paguyuban, atau asosiasi UMKM dalam rangka meningkatkan kemajuan pelaku UMKM.

Kata Kunci: Kampus Merdeka, UMKM, pemerintah, asosiasi.

*Correspondence Address : e.purwaningsih@yarsi.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v9i8.2022.2731-2740

© 2022UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Diketahui setelah lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat 49 Peraturan Pemerintah di antaranya PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil. Pengurusan izin dilakukan dengan sistem *online single submission* dan bebas biaya, demikian juga Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi perizinan tunggal bagi pelaku UMKM. PP nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal juga merupakan langkah pemerintah mengatur dan menetapkan aturan para pelaku usaha besar, baik di dalam dan luar negeri, yang ingin mendapatkan insentif harus menjalin kemitraan dengan pengusaha nasional maupun UMKM; sebagai kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi.

Dua tahun terakhir, para pelaku UMKM ibarat hidup di ambang keterpurukan, namun tekad menghidupi keluarga menjadi motivasi utama di masa pandemi. Permasalahan tidak hanya faktor produksi, namun kemampuan bersaing, teknologi dan legalitas serta *branding*. Harapan bangkit, mimpi merajai pasar domestik, bahkan mancanegara tidak bisa dicapai tanpa uluran tangan *stakeholders* termasuk kampus. Urgensi penelitian ini terkait Kampus Merdeka diharapkan mampu mendampingi tumbuh bangkitnya pelaku UMKM menjadi mitra, bersama *stakeholders* terkait, juga peran peneliti baik dosen dan mahasiswa khususnya dalam programmerdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Tidak mudah untuk mengantarkan UMKM pada muara urgensi tersebut, perlu dilakukan pemberdayaan yang berkesinambungan, *promote, protect and advance*, perlu difasilitasi, didampingi dan diberikan teladan. Perlu dibuatkan model sekaligus sebagai *pilot project* dengan transformasi digital dan mengelaborasi kebijakan, kolaborasi partisipatif antara program

kampus merdeka dan *stakeholder* UMKM serta mempromosikan keunggulan karakteristik produk beralaskan legalitas, IT dan *branding*.

Anggraeni, dkk (2015: 1286-1295) dalam "Pengembangan UMKM melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal" menyoroti permasalahan UMKM sebelum pandemic dan saat pandemic. Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, *state of the art* penelitian ini berfokus pada pemberdayaan UMKM melalui pengembangan berkelanjutan berbasis model kolaboratif partisipatif *stakeholder* UMKM dan Kampus Merdeka, bertumpu pada elaborasi kebijakan dan perlindungan hukum, *branding* dan IT didukung aktivitas merdeka belajar dosen dan mahasiswa, yang ditujukan untuk membuat model sebagai *pilot project*.

Sustainability development UMKM saat ini menjadi kebutuhan mendesak, agar UMKM terus berkembang dan berkelanjutan. Banyak hal dilakukan, penerapan teknologi produksi dengan pelbagai varian, peningkatan kualitas, kapasitas, serta inovasi.

(<http://sustainability.undip.ac.id/2020/08/25/pemberdayaan-umkm-dalam-mencapai-sdgs/> diakses 18 Agustus 2021). UMKM perlu terobosan dalam merespon pasar pasca pandemic.

Selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu dibuktikan peran sinergitas civitas akademika dengan *stakeholders* dalam rangka meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus; IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus; IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus, dan IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat, perlu dikaji secara mendalam terkait implementasi MBKM dan peran *stakeholders*, baik civitas akademika maupun *stakeholders* UMKM.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakan model yang tepat dalam pemberdayaan pelaku UKM seputar kampus dalam masa pemulihan ekonomi?
2. Bagaimanakah peran-peran terkait dalam model tersebut dapat diimplementasikan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian terapan, juga penelitian pemberdayaan dengan menggunakan *participatory research approach*, *statute approach*, dan *sociologish approach*. Subjek penelitian adalah pelaku UMKM berjumlah 91 UMKM dengan tingkat kesiapan teknologi (rerata TKT 2-3) di Cempaka Putih Jakarta Pusat yang berada dalam satu perkumpulan yang belum berbadan hukum.

Sumber data diperoleh dari: (1) data primer langsung dari pelaku UMKM melalui kuesioner; wawancara, pengamatan dan diskusi dengan Tim dari paguyuban, organisasi dan instansi terkait yakni pihak terkait yang selama ini aktif memberi pelatihan pada pelaku UMKM tersebut; (2) data sekunder dari literatur baik jurnal maupun buku dan regulasi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pemberdayaan Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zakaria (22-2-2022) salah satu pelaku UKM seputar kampus YARSI, dia dan istrinya sudah 20 tahun berdagang, dan hingga saat ini mampu bertahan, sebelum ashar sudah habis dagangannya berupa nasi warteg atau nasi rames. Atun dan Fatimah (11-2-2022) juga berjualan yang sama, hanya lebih diutamakan produk siap saji ayam penyet, ayam bakar dan kelengkapannya, mereka tidak

tutup selama pandemi, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Ketua Paguyuban UMKM Cempaka Putih JP42 Sukesih (5 Januari 2022), menyatakan bahwa keterpurukan pelaku UMKM antara lain sebagian tutup untuk sementara waktu karena memilih pulang kampung, tidak sanggup bertahan di kota Jakarta, dan sebagian sudah kembali bangkit dan berjualan mulai akhir tahun 2021 hingga saat ini. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat lebih dari 20 kios tutup selama periode penelitian ini, sehingga pelaku UMKM yang mengikuti kuesioner pun hanya berjumlah 54 orang dari 91 yang terdata. Sukesih juga menjelaskan perlu pendampingan dari kampus, baik dalam hal manajemen, *packaging*, inovasi produk, IT, pemasaran, maupun jika ada masalah terkait legalitas atau berperkara.

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM menyebutkan bahwa mereka terpuruk hingga 40- 80%, namun tetap semangat untuk bertahan karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Cempaka Putih, Lobo (2-2-2022) menyatakan bahwa pihaknya sering memberi pelatihan kepada UMKM dan memacu pelaku UMKM untuk promosi via bazar *online* dan *offline*. Dia ingin UKM naik kelas dan berharap pihak kampus berkontribusi dalam pelatihan, pendampingan dan pemajuan UKM. Lobo menyatakan kebijakan Pemerintah DKI di masa pandemic sangat mendukung pemulihan UMKM seputar kampus YARSI, bahkan se DKI.

Hasil wawancara dengan Notaris Irwan Santosa (20-2-2022) menyebutkan bahwa sebagai notaris dia sangat ingin membantu pelaku UKM seputar kampus sebagai bentuk pengabdianya, tanpa perlu membayar uang jasa kepadanya. Pelaku UMKM layak untuk dibantu agar mampu

bertahan dalam suasana buruk 2 tahun belakangan ini dan digandeng bersama oleh *stakeholders*, yakni Dinas Koperasi UKM, Pemerintah Kota dan masyarakat yang peduli termasuk kampus. Dosen dan mahasiswa jangan gamang untuk turun lapangan bersama.

Wawancara dengan Wakil Rektor I Universitas YARSI (Wening Sari) tanggal 22 Februari 2022, terkait kontribusi dan partisipasi YARSI dalam memulihkan UMKM seputar YARSI, secara institusi belum ada, namun beberapa dosen dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat telah bermitra dengan UMKM. MoU institusi dengan UMKM belum ada, kerja sama lebih ke dosen yang PKMnya bermitra dengan UMKM

Terkait MBKM, pelaksanaan di YARSI melibatkan dosen dan mahasiswa dalam sinergitas *stakeholders* Catur Dharma, dijelaskan bahwa kegiatan MBKM saat ini (memasuki semester ketiga) masih terpusat pada kegiatan Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Keterlibatan dosen (khususnya dosen PA) adalah tempat mahasiswa berkonsultasi sebelum mendaftar pada kegiatan Kampus Merdeka Kemendikbudristek, dan belum melibatkan *stakeholder* dari luar Universitas YARSI. Evaluasi terhadap Mitra Kampus Merdeka (supervisor di tempat magang, atau guru di sekolah tempat mahasiswa ditugaskan dalam Kampus Mengajar) umumnya mempunyai persepsi yang baik tentang performa mahasiswa Universitas YARSI peserta Kampus Merdeka.

Bentuk-bentuk kegiatan Merdeka Belajar yang sedang atau sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh YARSI, bahwa bentuk kegiatan pembelajaran Kampus Merdeka Kemendikbidristek yang sedang/sudah diikuti mahasiswa YARSI: 1) Kampus Mengajar, 2) Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), 3) Bangkit, 4) Kredensial Mikro Mahasiswa

Indonesia (KMMI), 5) International Credit Transfer, dan 6) *Indonesian International Student Mobility Award (IISMA)*

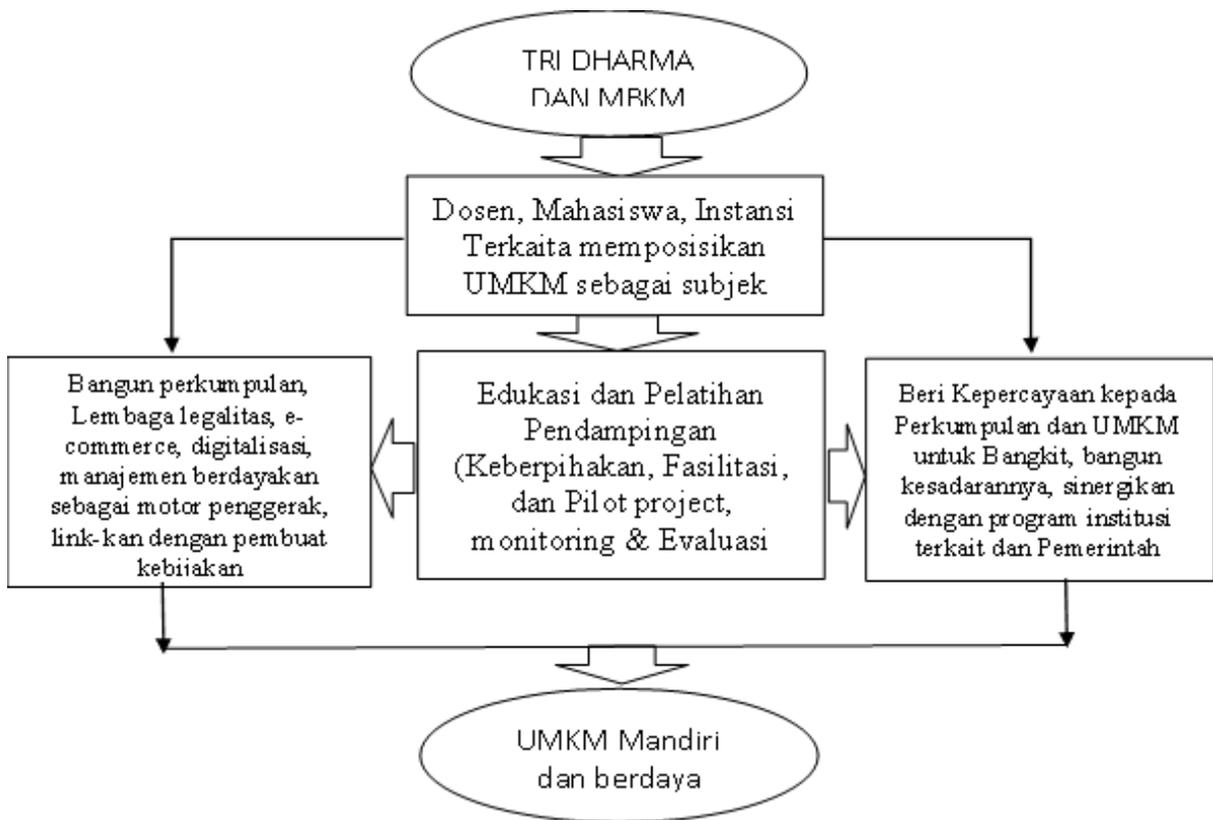
Ke depan, Universitas YARSI harus melakukan kegiatan MBKM secara mandiri dan menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan/organisasi/lembaga pemerintahan/PT dalam atau luar negeri agar dapat menjadi mitra untuk wahana MBKM mahasiswa. Selain itu di internal Universitas YARSI dapat menawarkan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM berupa: 1) KKN Tematik, 2) Asistensi pendidikan, 3) Asistensi penelitian, 4) Pengabdian masyarakat, 5) Kuliah Lintas Prodi.

Harapan sehubungan dengan kampus, terkait merdeka belajar, timbal balik kemanfaatan kampus dan pelaku UMKM, dan terkait partisipasi dosen dan mahasiswa, dijelaskan bahwa harapan makin banyak dosen yang menjalin kemitraan dengan UKM dan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan kerjasama. UMKM dapat menjadi mitra MBKM yang potensial dan menguntungkan bagi mahasiswa, dosen maupun institusi.

Bagi mahasiswa Bentuk Kegiatan Pembelajaran yang bisa dilakukan dalam UMKM adalah magang, Studi/Proyek Independen, Kewirausahaan, Pengabdian kepada Masyarakat (meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM), dan penelitian.

Bagi Dosen meningkatkan capaian kinerja Catur Dharma, sementara itu Pelaku UMKM dapat diundang untuk memberikan kuliah sharing pengalaman dan motivasi. Bagi Institusi meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus, IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus, IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus, dan IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat

Berikut gambar model yang dihasilkan berdasarkan *need assessment*:



Gambar 1. Model Kolaboratif Partisipatif UMKM-Kampus Merdeka menuju sustainable development

Seluruh uraian di atas pada dasarnya sejalan dengan Yulong & Hunter (2015) bahwa dalam rangka *sustainability* UMKM dibutuhkan uluran tangan kampus, pemerintah dan asosiasi UMKM itu sendiri untuk menolong UMKM agar tidak kalah bersaing dengan industri besar yang sudah memiliki modal besar dan mereka berbisnis dalam suatu group.

Literatur lain juga menemukan hal yang sama, sebut saja Tomey (2009) yang menemukan bahwa, pemberdayaan UMKM sangat perlu dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan bukan hanya pemerintah, tetapi juga perlu dukungan kampus, dan perkumpulan UMKM. Kampus dapat melakukan berbagai pembinaan, meningkatkan literasi, peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM, dan lainnya

Penelitian lain yang sangat terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Karsidi (2007) bahwa kampus mempunyai peran yang sangat besar dalam program pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan UMKM. Merekalah yang paling membutuhkan uluran tangan akademisi kampus mulai dari inovasi bahan baku, proses produksi, pengemasan, promosi, dan pemasaran.

Peran Kampus, Pemerintah, dan Asosiasi dalam Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada 54 pelaku UMKM dari jumlah keseluruhan 91 pelaku UMKM, bahwa pada prinsipnya pelaku UMKM seputar kampus YARSI dan kampus

YARSI saling mendukung dalam pelaksanaan program MBKM. Hasil *need assessment* berupa wawancara dan data primer sebagai berikut.

Tabel 1. Keinginan bekerjasama dengan kampus dan stakeholders lain

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	3.7	3.7
	2.00	5	9.3	13.0
	3.00	20	37.0	50.0
	4.00	18	33.3	83.3
	5.00	9	16.7	100.0
	Total	54	100.0	100.0

Sumber: Hasil analisis distribusi frekwensi

Tabel 1. tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang sangat mempunyai keinginan untuk memiliki dukungan kampus dan *stakeholders* lainnya yaitu sebanyak 9 orang (16,7%), dan mempunyai keinginan sebanyak 18 orang (33,3%). Apabila dijumlahkan pelaku UMKM yang sangat mempunyai keinginan dan mempunyai keinginan yang tinggi yaitu sebanyak 27 orang (50,0%). Sisanya sebanyak 50% tidak mempunyai keinginan untuk sinergi dengan MBKM.

Tabel 2. Peran Kampus dalam Pengembangan UMKM

Tanggapan UMKM	Jumlah	%
Sangat kurang mendukung	0	0
Kurang Mendukung	1	1,9
Sedang Mendukung	2	3,7
Sangat mendukung	11	20,3
Jumlah	40	74,1
Jumlah	54	100

Sumber: Hasil analisis data 2022

Tabel 2 menunjukkan bahwa peran kampus dalam pengembangan UMKM menurut pelaku UMKM merasakan sangat mendukung sebanyak 40 orang (74,1%, mendukung 11 orang (20,3%), sedang 2 orang (3,7%) dan kurang mendukung sebanyak 1 orang (1,9%). Hal itu menunjukkan bahwa,

kampus dipahami oleh pelaku UMKM sangat berperan tinggi atau penting dalam memajukan UMKM baik dalam inovasi bahan baku, inovasi produk, inovasi pengemasan, dan inovasi pemasaran. Hal ini berimplikasi bagi kampus untuk selalu meningkatkan perannya dalam memberikan masukan kepada UMKM binaannya dalam meningkatkan inovasi mereka mulai dari inovasi bahan baku yang lebih ekonomis, hingga inovasi di bidang pemasaran.

Peran kampus dalam pengembangan UMKM diwujudkan dalam bentuk MoU antara kampus dengan UMKM, memasukkan materi pengembangan UMKM di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), *updating* kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kondisi di lapangan, pada mata kuliah kewirausahaan dan mata kuliah lain yang relevan, mengakui kegiatan penelitian dan pengabdian oleh mahasiswa dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS), mengajak pelaku UMKM atau pengurus inti UMKM untuk mengikuti berbagai kegiatan seminar, lokakarya, simposium di kampus, bahkan menjadikan pengurus inti asosiasi menjadi narasumber seminar nasional tentang UMKM.

Melalui model di atas pelibatan mahasiswa di kanal mitra (Paguyuban UMKM JP.42 Cempaka Putih Jakarta Pusat) yaitu pada saat: 1) *need assessment*; menjangir aspirasi pelaku UKM, 2) Pelatihan hukum (legalitas, transaksi & merek), IT, manajemen, desain, perbankan, inovasi, marketing, 3) proses menuju digitalisasi, pendampingan aplikasi e commerce kulinerseputaryarsi yang telah dibuatkan oleh Tim, 4) model untuk hak cipta, 5) desain web dan produk pada aplikasi *e commerce*, 6) mendampingi pelaku UMKM, 7) mendampingi perkumpulan.

Tentu tidak lupa terdapat tujuan hilirisasi yang bersifat kemanfaatan ilmu civitas akademika pada masyarakat

umum dan dalam hal ini UMKM. Demikian pula hubungan timbal balik yang mutualism sangat diharapkan, semua masalah di lapangan dapat didiskusikan di kelas, dicarikan solusinya dan dikomunikasikan bersama *stakeholders*. ini juga merupakan pengayaan materi praktis yang tidak diperoleh melalui bangku kuliah.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Arifin & Muslim (2020) yang menyimpulkan bahwa meskipun program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) masih banyak tantangannya, tetapi kampus sebagai *agent of change* harus memberikan kontribusi besar dalam bentuk pemberdayaan UMKM.

Hasil penelitian ini pada dasarnya juga berbeda jauh dengan temuan Fachrisal (2020) yang meneruskan bahwa dalam teori Pendidikan orang dewasa, kampus yang mendidik orang dewasa mempunyai andil yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya dalam meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan masyarakat.

Penelitian Krishnapatria (2021); Nehe (2021) juga menemukan bahawa, program kampus merdeka akan mampu memberikan warna tersendiri dalam pembangunan masyarakat, khususnya kelompok bawah termasuk UMKM.

Tabel 3. Peran Pemerintah dan Stakeholders lain (Notaris dan LSM yang peduli)

Tanggapan UMKM	Jumlah	%
Sangat kurang berperan	0	0
Kurang berperan	0	0
Sedang	3	5,6
Berperan	9	16,7
Sangat berperan	42	77,7
Jumlah	54	100

Sumber: hasil analisis data 2022

Merujuk data di atas menunjukkan bahwa peran pemerintah dan *stakeholders* lainnya seperti notaris

atau pihak lain yang peduli mempunyai peran yang sangat signifikan (77,7%). Pelaku UMKM juga menganggap bahwa peran pemerintah bersifat penting (16,7%) ada 5,5% pelaku UMKM yang menganggap peran pemerintah dan *stakeholders* sedang. Hal ini berimplikasi praktis, bahwa Pemerintah dan *Stakeholders* hendaknya selalu hadir dalam setiap kegiatan pengembangan UMKM. Jenis kegiatan pengembangan UMKM sangat variatif seperti pengembangan kelembagaan, *branding* melalui pendaftaran merek, pengembangan permodalan, pengembangan omzet UMKM, pengembangan jangkauan pemasaran, dan pengembangan kinerja UMKM dalam bentuk laba. Semua itu sangat penting dilakukan dalam rangka *sustainability* UMKM dalam jangka panjang.

Peran Pemerintah dan *stakeholders* lainnya meliputi: 1) mendampingi dan melindungi pelaku UKM dari persaingan usaha, dan memberi keberpihakan agar pelaku UKM mampu percaya diri dan mandiri, 2) memberi peningkatan fasilitasi sesuai kebutuhan pelaku UKM termasuk factor produksi dan legalitas, 3) membina dan mempromosikan produk unggulan pelaku UKM agar mencuat dalam permukaan, dan dapat dikenali sebagai ciri atau ikon, dan 4) memberi pelatihan secara berkelanjutan untuk mengetahui apakah benar-benar terjadi kemajuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Halik (2014) yang menemukan bahwa, peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM sangat penting dalam bentuk regulasi, permodalan, dan perlindungan dari kartel dan monopoli. Riyanto et.al (2014) juga menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kontribusi dalam penciptakan ekosistem perekonomian yang kondusif bagi peningkatan peran UMKM dalam pengembangan perekonomian suatu negara.

Tabel 4. Peran Perkumpulan UMKM dalam Pengembangan UMKM

Tanggapan UMKM	Jumlah	%
Sangat kurang membantu	0	0
Kurang membantu	2	3,7
Sedang Membantu	6	11,1
Sangat Membantu	14	25,9
Jumlah	32	59,3
	54	100

Sumber: Hasil analisis data 2022

Tabel 3 menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap peran asosiasi sangat variatif, terbukti dari 54 pelaku UMKM 59,3% di antaranya mengatakan bahwa asosiasi sangat berperan penting dalam pengembangan UMKM. Sebanyak 14 pelaku UMKM (25,9%) pelaku UMKM mengatakan membantu, sebanyak 6 pelaku UMKM (11,1%) mengatakan membantu dalam taraf sedang. Sangat disayangkan masih ada 2 pelaku UMKM (3,7%) yang mengatakan bahwa asosiasi UMKM tidak mampu membantu pengembangan UMKM. Hal itu dapat dipahami bahwa, aspek yang paling penting bagi UMKM adalah produk barang dan atau jasa mereka laku di pasar, dan mereka dapat melanjutkan usahanya meskipun hanya bersifat subsisten (kembali modal) dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 2 pelaku UMKM tersebut merasakan bahwa, kegiatan asosiasi hanya menghabiskan waktu untuk rapat-rapat, menambah pengeluaran dalam bentuk iuran asosiasi dan iuran dana sosial, dan mungkin hanya digunakan oleh pihak lain dalam bentuk kegiatan politik.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Haris (2019) yang menyimpulkan bahwa asosiasi UMKM sebagai modal sosial mempunyai peran dalam menjaga kekompakan UMKM dalam memperjuangkan hak-hak mereka terutama saat dirugikan oleh pihak ketiga termasuk pemerintah. Begitu juga Rubiwan (2020) peran asosiasi UMKM

sebagai modal sosial UMKM dalam memberikan pembelaan pada anggotanya yang mengalami berbagai kesulitan termasuk permodalan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa, peran pelaku UKM dan perkumpulan meliputi: 1) aktif dan terbuka terhadap perubahan, jalin kerjasama dengan kampus dan dinas terkait, 2) berusaha terus inovasi dan merambah digitalisasi, 3) menerapkan *e commerce* dan fasilitasi dari *stakeholders*, 4) berani 'naik kelas' dengan HKI dan desain yang menunjang *digital marketing*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan:

1. Model yang paling tepat dalam memajukan UMKM adalah dengan meningkatkan peran perguruan tinggi, pemerintah dan stakeholders, termasuk perkumpulan atau Asosiasi UMKM. Perguruan tinggi mempunyai peran yang paling besar meningkat kampus mempunyai program MBKM yang sangat berguna dalam berkolaborasi dengan UMKM dalam pemberdayaan pelaku UMKM. Pemerintah dan Perkumpulan Asosiasi UMKM juga mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dalam memberdayakan UMKM. Manakala ketiga aspek tersebut telah berperan dengan baik dan simultan, maka kemajuan ekonomi pelaku UMKM akan meningkat, dan pendapatan nasional juga meningkat.
2. Pelaku UMKM mayoritas mempunyai keinginan untuk mendapatkan dukungan kampus dalam memajukan UMKM baik dalam inovasi

bahan baku, inovasi produk, inovasi pengemasan, dan inovasi pemasaran. UMKM juga sangat menghendaki dukungan dari pemerintah Pemerintah dan *stakeholders* dalam membangun regulasi yang berpihak pada UMKM, pemberian modal lunak, dan berbagai sosialisasi yang dapat meningkatkan literasi pelaku UMKM. Mayoritas UMKM juga menghendaki adanya perkumpulan UMKM untuk membela hak-hak UMKM, pelatihan peningkatkan inovasi produk dan pemasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih dan penghargaan diberikan kepada LPDP dan Dikti serta Universitas YARSI yang telah membantu dan memfasilitasi selesainya penelitian ini, juga kepada Paguyuban UMKM JP-42 Jakarta Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Achrissal, F. (2020). "Merdeka Belajar-Kampus Merdeka" Dalam Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan KH Ahmad Dahlan. Seminar Nasional Seni Dan Desain <https://proceedings.sendesunesa.net/pt/publications/333150/merdeka-belajar-kampus-merdeka-dalam-pemikiran-ki-hadjar-dewantara-dan-kh-ahmad>

Anggraeni, F.D., Hardjanto, I., Hayat, A. "Pengembangan UMKM melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik*, Bol 1(6), 2015. 1286-1295. <https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menemen.pdf>

Arifin, S., & Muslim, M. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan "Merdeka Belajar, Kampus Merdeka" Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1). <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v3i1.589>

Halik, A. (2014) Peran Pemerintah Kota Serang dalam Kebijakan pengembangan pasar Tradisional. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 6(2)

Haris, M.N. (2019) Analisis peran modal sosial dalam mengatasi permasalahan permodalan, sumber daya manusia, pemasaran, dan produksi pada UMKM. Skripsi. Jurusan Ekonomi FEB Universitas Brawijaya, jimfeb.ub.ac.id

Karsidi, Ravik. 2007. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah). *Jurnal Penyuluhan Volume 2 Nomor 2*. Institut Pertanian Bogor.

Krishnapatria, K. (2021). Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Curriculum in English Studies Program: Challenges and Opportunities. *ELT in Focus*, 4(1), 12-19. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/ELTINFOCUS/article/view/5276>

Nehe, B. M. (2021). Analisis Konsep Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Masa Pandemi di STKIP Setia Budhi Rangkasbitung 2021. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Setia Budhi*, 1(1), 13-19. <http://jurnal.stkipsetiabudhi.ac.id/index.php/prosiding/article/view/18/9>

Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman

Riyanto PRatisi, R.N, Firmansyah, R. (2014) Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaen Madiuan. *Jurnal Administrasi Publik Vol 2(1)*

Rubiwan, S. (2020) Peran Modal sosial dalam pengembangan UMKM pada Kerajinan Keramik Sanggar Asmat Desa Lumbir Kabupaten Banyumas. Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah, FEBI IAIN Purwokerto. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/.pdf>

Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 203-219. <https://doi.org/10.24036/sikola.v2i3.108>

Tomey, Anne H. (2009). Empowerment and Disempowerment in Community Development Practice: Eight Roles Practitioners Play. *International Journal of Community Development Oxford University Volume 46*

Number 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja

Yulong, Li dan Caroline Hunter. 2015.
"Community involvement for sustainable
heritage tourism: a conceptual model", *Journal of
Cultural Heritage Management and Sustainable
Development*, Vol. 5 Issue: 3, pp.248-262.
Tersedia (online)
[https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2014-
0027](https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2014-0027). Diakses pada 21 Juli 2018 pukul 10:18 WIB.